YOGYAKARTA

SUYATI TERHARU DIPERHATIKAN PEMKOT

1.410 Lansia Peroleh Bantuan Asistensi Sosial

YOGYA (KR) - Sebanyak 1.410 warga lanjut usia (lansia) di Kota Yogya memperoleh Bantuan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin (ASLUM) tahun 2023. Masing-masing mendapatkan alokasi Rp 400.000 untuk periode November dan Desember yang diberikan sekaligus.



Sekda Kota Yogya secara simbolis menyerahkan bantuan ASLUM tahun 2023 bagi penerima.

Sekda Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya MM, menjelaskan ASLUM yang diberikan Pemkot Yogya merupakan bentuk intervensi bagi sasaran yang memang secara aturan berhak menerima bantuan. Akan tetapi di sisi lain mereka sama sekali belum pernah mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat.

"Dalam memberikan afirmasi kami memang mengupayakan tidak ada tumpang tindih. Sehingga jaminan perlindungan sosial ini bisa terbagi merata," ungkapnya di sela penyerahan secara simbolis di Kantor Kas BPD DIY komplek Balaikota Yogya, Rabu (6/12).

Di samping itu, keberadaan ASLUM sekaligus membuktikan jika program afirmasi sosial yang

diberikan oleh Pemkot merambah semua strata, mulai dari balita hingga lansia. Bahkan anggota keluarga dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) yang meninggal dunia juga berhak atas santunan kematian sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah.

Aman berharap ASLUM yang diberikan kali ini mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta memberikan kemanfaatan bagi setiap penerima. Terlebih memasuki akhir tahun kerap terjadi ritme peningkatan kebutuhan maupun kenaikan harga bahan pokok. "Rasanya bantuan ini bisa memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan di masa kini," tandasnya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmi-

(Dinsosnakertrans) Kota Yogya Maryustion Tonang, mengaku sudah melakukan penyisiran secara ketat terhadap para penerima ASLUM tahun ini. Seluruhnya dipastikan belum mendapatkan bantuan serupa dari pemerintah pusat. Jumlah bantuan disesuaikan dengan program Sembako maupun bantuan PKH komponen lansia dari pusat yakni sebesar Rp 200.000 per bulan. Oleh karena itu untuk periode November dan Desember diberikan sekaligus sebesar Rp 400.000.

'Semuanya sudah masuk ke rekening Bank BPD DIY. Semoga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.

Sementara salah satu penerima ASLUM tahun 2023, Suyati warga Mujamuju Umbulharjo meng-

aku terharu dengan perhatian yang diberikan Pemkot tersebut. Menurutnya ia baru pertama kali ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Suyati sangat bergantung dari pemberian anak-anaknya. Kini ia bertekad untuk mengurangi ketergantungan dari anak-anaknya dengan menjadikan ASLUM yang diterimanya sebagai tambahan modal.

"Tidak akan saya belanjakan semuanya. Mau coba saya pakai untuk usaha membuat pepes dan dijual agar tidak terus-terusan bergantung sama anakanak. Tapi terus terang rasanya senang bisa mendapat bantuan. Ini baru pertama kali, selama ini belum pernah ada bantu-(Dhi)-f an," urainya.

KEDEPANKAN ASPEK PENCEGAHAN PELANGGARAN

Bawaslu Gagalkan Pembagian Sembako di Masa Kampanye

YOGYA (KR) - Hingga hari ke delapan masa kampanye sejak 28 November 2023 lalu, sejumlah potensi pelanggaran sudah berhasil dipetakan. Bawaslu Kota Yogya bahkan berhasil menggagalkan pembagian sembako di masa kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kota Yogya Andie Kartala, menjelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sudah diatur secara rigid mengenai alat peraga dan bahan kampanye yang boleh dibagikan oleh peserta pemilu. Dalam aturan itu, bahan kampanye meliputi antara lain stiker, brosur, pamflet, stiker, alat makan minum, kalender, pin, dan lainnya.

"Sembako maupun doorprize tidak boleh dibagikan oleh peserta pemilu kepada peserta kampanye. Ini sempat menjadi temuan kami dan dibawa kembali oleh peserta pemilu," ungkapnya, Rabu (8/12).

Bentuk sembako yang hendak

doorprize berupa kipas angin, dispenser meja, tungku kompor gas dan seterika.

Temuan itu terjadi ketika Bawaslu Kota Yogya beserta Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan di Kemantren Danurejan dan Gondokusuman. Pada saat itu tengah dilakukan kegiatan bersama yang melibatkan salah satu caleg atau peserta pemilu. Lantaran mendapatkan imbauan dari petugas Bawaslu, paket sembako dan doorprize tersebut akhirnya urung dibagikan dan dibawa kembali oleh peserta pemilu.

Andie berharap seluruh peserta pemilu mampu memahami aturan kampanye secara utuh. Hal ini karena aturan baik Peraturan KPU 15/2023 maupun Peraturan Walikota (Perwal) Yogya 75/2023 sudah sangat jelas mengatur hal yang diperbolehkan dan dilarang selama masa kampanye.

kami lebih mengedepankan pencedibagikan oleh peserta pemilu gahan agar jangan sampai terjadi melalui mekanisme penanganan ialah minyak goreng. Sedangkan pelanggaran. Sosialisasi dan pelanggaran," katanya.

edukasi terkait regulasi juga sudah kami lakukan di forum-forum tingkat kemantren maupun yang melibatkan peserta pemilu," pa-

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogya Jantan Putra Bangsa, menambahkan selain menggagalkan pembagian sembako pihaknya juga berupaya mencegah terjadinya pelanggaran dalam hal pemasangan alat peraga kampanye. Pihaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif agar alat peraga yang melanggar ditertibkan secara mandiri. Akan tetapi jika tidak segera dilakukan maka akan direkomendasikan penertiban ke KPU untuk ditindaklanjuti oleh Sat Pol PP Kota Yogya.

"Semua yang diduga melanggar sudah dikomunikasikan secara persuasif dan sudah dipindahkan sendiri. Sampai saat ini dalam proses itu. Tapi nanti jika ada yang "Dalam konteks pengawasan, sudah diperingatkan tidak mengindahkan, maka akan ditindak

KASUS COVID-19 DISEJUMLAH NEGARA NAIK Jelang Libur Akhir Tahun, DIY Lakukan Antisipasi

YOGYA (KR) - Meski pemerintah pusat belum mengeluarkan instruksi khusus, tetapi peningkatan kasus Covid-19 yang cukup drastis di Singapura dan Malaysia tetap menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY. Terutama saat momentum libur panjang akhir tahun. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah ada, setiap libur akhir tahun jumlah kunjungan wisatawan di DIY mengalami kenaikan cukup signifikan.

"Sebenarnya kalau dari Kemenkes itu yang Covid-19 malah belum ada arahan. Namun secara prinsip penanganan untuk kasus-kasus semacam ini kita sudah punya dasarnya untuk penanganan Covid-19 seperti yang kemarin," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinkes DIY Setiyo Harini di Yogyakarta, Rabu (6/12).

Setivo Harini mengatakan, sampai saat ini tren kasus Covid-19 di DIY sudah semakin menurun. Bahkan akhir-akhir ini sudah tidak diminta untuk pelaporan rutin yang harian. Kasus mingguan sudah mulai berkurang karena seiring dengan tren kasus yang menurun. Walaupun begitu fasilitas layanan kesehatan masih menyediakan layanan tes pemeriksaan Covid-19. Dinkes DIY masih tergabung dalam Satgas Penanggulangan Covid-19 sehingga masih berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk upaya pencegahan.

"Kalau secara mandiri masih disediakan, tapi itu di fasilitas swasta. Kalau

secara pemerintah kita sedang mengalihkan mekanisme ke pemeriksaan penyakit pernafasan biasa. Jadi nanti bukan lagi menjadi sesuatu yang spesifik, ungkapnya.

Menurutnya, Dinkes DIY sudah memiliki mekanisme yang telah disusun dalam bidang kesehatan dan non kesehatan terkait Covid-19. Jadi lonjakan Covid-19 kembali muncul, mekanisme penanggulangan seperti sebelumnya akan diaktifkan kembali. Kendati demikian dirinya berharap jangan sampai kasus Covid-19 kembali muncul.

Sementara itu pakar Epidemiologi UGM Riris Andono Ahmad menjelaskan, naik turunnya kasus Covid-19 di berbagai negara merupakan hal yang wajar, karena virus ini masih bersirkulasi. Selama bersirkulasi virus akan terus bermutasi. Hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan monitor secara terus menerus terhadap kenaikan dan penurunan kasus. Untuk itu pihaknya berharap pemerintah dapat menganalisa kenaikan kasus pada sejumlah negara. Apakah ada peningkatan kasus kematian, komorbid dan lain sebagainya, karena yang akan terdampak secara langsung adalah masyarakat.

"Saya kira saat ini wajar jika kasus Covid-19 naik turun. Namun ketika angka penularan dan objeknya tidak berubah signifikan, maka yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah soal hati-hati dan menjaga kondisi fisik agar tidak mudah sakit," imbuhnya. (Ria)-f

DIBUKA HINGGA AKHIR MASA KAMPANYE

Pemkot Buka Layanan Pemasangan APK

YOGYA (KR) - Sejak Perwal 75/2023 terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye diberlakukan, Pemkot Yogya membuka layanan konsultasi. Layanan tersebut dibuka di Mal Pelayanan Publik (MPP) komplek Balaikota Yogya hingga berakhirnya masa kampanye pada 10 Februari 2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogya Budi Santosa, menjelaskan loket tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pengurus partai politik, caleg maupun simpatisan dalam melaksanakan kampanye agar tertib aturan. "Adanya layanan bermula ini dari pemenuhan kewajiban instansi kami untuk memberikan izin pemasangan APK karena sudah terbit perwalnya," jelasnya, Rabu (6/12).

Layanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Yogya tersebut dibuka setiap hari kerja pada jam 08.00-14.00 WIB. Loket tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan konsultasi terkait lokasi, kesulitan dalam pengajuan permohonan melalui aplikasi bahkan masyarakat dapat melakukan aduan pemasangan terkait reklame atau baliho yang belum mendapatkan izin pasang yang akan dite-

maupun KPU.



Pemasangan bendera sejumlah parpol sudah marak terjadi sejak beberapa wak-

tu lalu disejumlah titik di Kota Yogya. Permohonan izin pemasangan APK sebenarnya juga bisa difasilitasi secara online melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Akan tetapi desk manual tetap harus diberikan lantaran regulasinya cukup detail supaya pemohon tidak mengalami kesulitan.

Budi Santoso berharap, dengan adanya loket konsultasi tersebut pesta demokrasi pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan tertib oleh seluruh pihak. Dengan begitu Kota Yogya bisa terlihat estetik, bersih, indah dan tertib.

"Harapannya pelakruskan ke pihak Bawaslu sanaan kampanye bisa sesuai regulasi sesuai de-

ngan yang sudah disepakati, baik pemasangannya, kontennya kemudian juga durasi waktunya. Tanggung jawab kita selesai pada saat pemberian izin dalam bentuk stiker. Ketika nanti tidak sesuai regulasi yang pada saat pemasangan atau mengupload, akan ada penertiban yang menjadi ranahnya Bawaslu, KPU serta Sat Pol PP," imbuhnya.

Dalam perwal tersebut juga mencantumkan secara detail lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK, seperti sepanjang Sumbu Filosofi, beberapa kawasan heritage di Kota Yogya seperti bangunan di Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Komplek Pemandian Tamansari, Kawasan Istana Kraton, Kawasan Istana Kadipaten Pura Pakualaman, Situs Warungboto, Taman Adipura serta Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan.

Selain itu juga beberapa ruas jalan antara lain Jalan Jendral Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margomulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung, Jalan Simpang Empat Pasar Sentul sampai ke Simpang Tiga Jalan Gajah Mada, seputaran halaman Pakualaman, Jalan Panembahan Senopati, serta Jalan KH. Ah-(Dhi)-f mad Dahlan.

WORKSHOP UNIQUE SELLING POINT (USP) EKRAF Dilaksanakan di Kampung Wisata Wirobrajan



YOGYA (KR) - Dinas Pariwisata DIY

B, R.B Dwi Wahyu B dalam acara tersebut memberikan arahan dan semangat kepada peserta workshop untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata Kota Yogyakarta. la menyebut Wirobrajan menjadi salah satu

optimalkan potensi wisatanya. "Sebetulnya workshop ini untuk meningkatkan atau memetakan potensi di wilayah. Pengurus kampung sudah harus mengevaluasi dan memetakan potensinya. Jika sudah terkonsep wisatawan dapat masuk kampung, tidak hanya wisata di Malioboro. Kampung pun harus siap mengakomodir

bagian Kota Yogyakarta yang harus meng-

potensi produk-produknya" kata Dwi Narasumber yang dihadirkan dalam workshop tersebut yakni Edi Budiyanto seorang CEO CV.Digital Lumbung Kaweruh. Dalam pemaparannya Edi mengungkapkan pentingnya pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online media sosial. Di era digital, mayoritas bahkan hampir semua orang memiliki gadget. Edi memberi contoh bahwa untuk menjalankan bisnis kuliner dengan memanfaatkan sisi kreatif dan inovatif akan mempermudah menemukan Unique Selling Point (USP). Menciptakan Unique Selling Point (USP) atau titik penjualan unik atau keunggulan dalam bisnis kuliner adalah cara untuk membedakan diri dari pesaing dan menarik perhatian pelanggan. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa pelanggan membeli produk.

Acara Workshop Unique Selling Point (USP) Ekonomi Kreatif di Kampung Wisata yang diinisiasi Dinas Pariwisata DIY bekerjasama dengan DPRD DIY tersebut menggunakan anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023 dan ditutup dengan sharing serta tanya jawab. (*)

lokasi salah satunya kampung wisata Wirobrajan pada Selasa (5/12) Acara Workshop USP dilaksanakan di Balai RW 07 Wirobrajan dengan peserta adalah pelaku usaha maupun pengurus RW. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata DIY, Fitri Dyah Wahyuni. Dalam sambutannya Fitri Dyah Wahyuni mengatakan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak terlepas dari potensi masyarakat. Masyarakat Wirobrajan yang memiliki potensi tersebut diharapkan dapat kreatif dan inovatif dalam memasarkan produknya. Fitri juga berharap melalui diskusi USP ekraf tersebut para pelaku usaha dapat

mendukung majunya produk ekonomi

kreatif/UMKM sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Yogyakarta

disamping sebagai satu sisi yang tidak

terpisahkan dari sektor pariwisata DIY. Salah

satu bentuk dukungan Dinas Pariwisata DIY

tersebut adalah dengan penyelenggaraan

Workshop Unique Selling Point (USP)

Ekonomi Kreatif Kampung Wisata di beberapa

wisatawan yang datang. "Produk-produk ekonomi kreatif yang unique harus memiliki perijinan, merk dagang yang paten sehingga dapat meyakinkan wisatawan untuk membelinya. Melalui acara ini kami mengajarkan digital marketing melalui gadget, bagaimana produk ekraf juga didaftarkan merknya agar terlindungi, tidak ada plagiasi. Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata maka usaha ekraf kita juga memiliki potensi untuk dilirik oleh wisatawan'

mengembangkan produknya sehingga pelaku

usaha dapat menawarkan produknya kepada

Sementara itu anggota DPRD DIY Komisi